

## ANALISIS KASUS KORUPSI MENTERI PERTANIAN SYL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP PUBLIC TRUST DI INDONESIA

Andryana Perkasaputra, M. Rasikh Wildan Mahdi, Rahmavenda Tri Puspitasari  
Fakultas Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia

### ABSTRAK

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), memiliki dampak yang besar terhadap konsep public trust di Indonesia. Penegakan hukum dan transparansi dianggap penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik sehingga upaya pencegahan korupsi dan penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk memulihkan public trust dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Pengoptimalan pengawasan, pengembangan sistem pencegahan berbasis IT, pembuatan undang-undang yang tegas, dan pengembangan sistem pengaduan yang melindungi pelapor korupsi menjadi upaya untuk menekan kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Essay ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kasus korupsi yang melibatkan SYL dan implikasinya terhadap konsep public trust di Indonesia, serta dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi, penegakan hukum yang lebih efektif, dan pemulihan public trust di Indonesia.

**Kata Kunci:** Korupsi; Public trust; Integritas; Netralitas; Penegakan Hukum

### ABSTRACT

The corruption case involving the former Minister of Agriculture, Syahrul Yasin Limpo (SYL), has had a major impact on the concept of public trust in Indonesia. Law enforcement and transparency are considered important in maintaining public trust in the government and public institutions, so efforts to prevent corruption and enforce the law need to be increased to restore public trust and build clean governance. Optimizing supervision, developing an IT-based prevention system, making strict laws, and developing a complaint system that protects corruption whistleblowers are efforts to suppress cases of corruption that are rife in Indonesia. It is hoped that this essay can provide an in-depth understanding of corruption cases involving SYL and their implications for the concept of public trust in Indonesia, as well as contribute to efforts to prevent corruption, more effective law enforcement, and restore public trust in Indonesia.

**Keywords:** Corruption; Public trust; Integrity; Neutrality; Law Enforcement

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kasus ini melibatkan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL diduga melakukan pungutan dan menerima setoran dari bawahan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarganya. Selain itu, terdapat juga dugaan penggunaan uang untuk pembayaran cicilan kartu kredit, mobil, perbaikan rumah, tiket pesawat, dan pengobatan, yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Kasus korupsi ini menunjukkan pelanggaran terhadap konsep public trust di Indonesia. Konsep public trust menekankan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas kepercayaan dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, tindakan korupsi oleh pejabat publik, seperti yang diduga dilakukan oleh SYL, merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan transparansi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.

Kasus korupsi yang melibatkan Menteri SYL telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap konsep public trust di Indonesia. Beliau diduga terlibat dalam kasus korupsi yang

melibatkan dana proyek infrastruktur dalam skala besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait integritas pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik seperti Menteri SYL telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi negara. Implikasi dari kasus ini adalah melemahnya konsep public trust, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang terkikis dapat berdampak buruk pada stabilitas politik dan sosial, serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan upaya pencegahan korupsi perlu ditingkatkan untuk memulihkan public trust dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR

### 2.1 Konsep Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang ada karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), mencakup dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh SYL, mantan Menteri Pertanian, melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, termasuk mengenai tindakan pencegahan, penyidikan, penuntutan, hukuman, dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam konteks kasus korupsi yang melibatkan SYL, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum yang relevan. Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap konsep public trust di Indonesia, di mana pejabat publik bertanggung jawab atas kepercayaan dan kepentingan publik. Tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh SYL merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan transparansi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik menjadi sangat penting dalam konteks kasus ini.

Penegakan hukum yang kuat dan transparan terhadap kasus korupsi yang melibatkan SYL akan memperkuat integritas lembaga publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Mengambil langkah tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi kunci dalam menegakkan keadilan serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang menggerus sistem dan kepercayaan publik. Keseimbangan antara penegakan hukum dan kesadaran akan pentingnya etika dan integritas dalam kepemimpinan publik akan menjadi landasan yang solid bagi pembangunan masyarakat yang adil dan berintegritas.

### 2.2 Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik

Salah satu badan publik di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi industri pertanian dan pangan di Indonesia adalah Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik diwajibkan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi publik. Sebagai Badan Publik, Kementerian Pertanian harus menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, keterbukaan, dan pelibatan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan industri pertanian Indonesia dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kebijakan dan inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap unit kerja dan unit pelaksana teknis dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya sebagai Badan Publik. Informasi publik wajib dikelola dan disediakan untuk dapat diakses oleh masyarakat oleh PPID. Selain itu, pada kategori Kementerian untuk tahun 2020 dan 2021, Kementerian Pertanian mendapatkan predikat Badan Publik Informatif. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah menjadi Badan Publik yang terbuka dan transparan dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara efektif di unit-unit kerjanya.

Efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan adalah lima pilar tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diperhatikan oleh Kementerian Pertanian dalam menjalankan kewajibannya. Dalam industri pertanian dan pangan di Indonesia, Kementerian Pertanian seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan layanan yang berkualitas dengan mematuhi standar-standar ini.

### **2.3 Public Trust dalam Pemerintahan Indonesia**

Public trust atau kepercayaan publik merupakan hasil dari kinerja dan kualitas administrasi publik yang juga berperan dalam menyelenggarakan administrasi itu sendiri. Di Indonesia, public trust mulai diperhatikan dan dipertimbangkan setelah terjadinya krisis ekonomi dan politik di era orde baru. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi kedua hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan yang berujung pada gerakan reformasi untuk menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden.

Kepercayaan publik bukan semata-mata hasil dari upaya efektif dalam mencegah korupsi, tetapi merupakan hasil dari pemerintah yang memastikan penggunaan sumber daya publik secara efektif dengan meminimalkan pemborosan dan mengkonsolidasikan legitimasi fiskal pemerintah. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan dana dari pajak yang dibayarkan masyarakat harus digunakan sebaik mungkin; tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak namun juga berkontribusi pada keberlanjutan masyarakat dalam jangka panjang. Penggunaan dana pembayar pajak yang bertanggung jawab dan efisien, dilengkapi akses informasi dan keterlibatan masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan publik. Pemerintah juga diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat menumbuhkan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang menguntungkan dan memperkuat kepercayaan publik.

Integritas yang tinggi dan sikap netral dalam pengambilan keputusan yang diterapkan oleh pemerintah juga dapat mendorong kepercayaan publik. Undang-undang terkait integritas dan netralitas pun telah ditetapkan sebagai upaya menjaga public trust. Dasar hukum terkait integritas ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara. Adapun dasar hukum netralitas aparatur sipil negara (ASN) meliputi Undang-Undang no. 5 Tahun 2014 tentang ASN; Peraturan Pemerintah no. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan lain-lain.

## PEMBAHASAN

### 3.1 Kronologi Kasus dan Fakta Terungkap Kasus SYL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Pertanian, sebagai tersangka dalam sebuah kasus yang menghebohkan selama seminggu terakhir. Semuanya dimulai dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas Syahrul, yang kemudian menarik perhatian hingga Presiden Joko Widodo. Dalam kasus ini, Syahrul diduga terlibat dalam tiga tindak pidana, termasuk pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. KPK berhasil menyita dana sebesar Rp 30 miliar terkait kasus ini. Selain itu, ada laporan mengenai dugaan pemerasan yang dialami oleh Syahrul, yang kemudian dilaporkan kepada Polda Metro Jaya. Saat ini, Polda tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan pemerasan tersebut. Semua perkembangan ini akhirnya mengakibatkan Syahrul mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian.

Kabar terbaru dari kasus yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian adalah bahwa penetapan status tersangka terhadapnya dimulai dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas pada 28 September 2023. Dari penggeledahan tersebut, KPK berhasil menyita dana sebesar Rp 30 miliar dalam bentuk Rupiah dan mata uang asing. Selain itu, KPK juga berhasil mengamankan bukti transaksi keuangan serta pembelian barang berharga. Belakangan, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Syahrul di Kota Makassar dan berhasil menyita sebuah mobil Audi A6. Dugaan korupsi lainnya di Kementerian Pertanian mencakup pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. Saat rumahnya digeledah, Syahrul sedang melakukan perjalanan dinas ke Eropa, yakni Italia dan Spanyol. Meskipun seharusnya sudah kembali pada 1 Oktober 2023, keberadaannya sempat menjadi misteri. Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qolbi, tidak mengetahui keberadaan Syahrul pasca perjalanannya ke Almeria, Spanyol, dan Roma, Italia. Namun, Syahrul akhirnya kembali ke Indonesia pada 4 Oktober 2023 setelah melakukan perjalanan udara dari Singapura. Hanya dalam satu hari setelah pulang, ia mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Jokowi melalui Mensesneg Pak Praktikno.

Selama penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, muncul dugaan pemerasan dari pimpinan KPK terhadap Syahrul. Laporan mengenai hal ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023. Polda Metro Jaya telah meminta keterangan dari beberapa pihak termasuk Syahrul Yasin Limpo yang sudah diperiksa sebanyak tiga kali. Awalnya, Ketua KPK Firli Bahuri membantah menerima uang terkait penyelidikan kasus tersebut dan juga mengklaim tidak pernah bertemu dengan Syahrul. Namun, akhirnya Firli mengakui pertemuan mereka setelah foto mereka bertemu viral. Dia mengakui bertemu dengan Syahrul di lapangan bulutangkis pada Maret 2022, namun membantah adanya pemerasan atau pelanggaran etik dalam pertemuan tersebut. Pada akhirnya, Syahrul bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 8 Oktober 2023 dan memutuskan untuk mundur dari jabatan Menteri Pertanian. Dalam pertemuan tersebut, SYL meminta maaf kepada Jokowi karena tidak dapat melanjutkan jabatannya sebagai Mentan hingga akhir masa jabatan, sambil mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

### 3.2 Faktor-Faktor Penyebab Korupsi SYL

Tindak pidana yang dikenal sebagai korupsi adalah penyalahgunaan wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Mengenai Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian Indonesia, ia diduga terlibat dalam tuduhan korupsi yang mencakup pencucian uang,

penyuapan, dan pemerasan selama menjabat sebagai pejabat publik.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh SYL, mantan Menteri Pertanian, dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang dapat dijelaskan secara mendalam. Pusat Edukasi Antikorupsi KPK membedakan dua kategori penyebab terjadinya korupsi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Gaya hidup konsumtif, kurangnya moral, dan kerakusan atau keserakahan adalah contoh pengaruh internal. Kecenderungan terhadap kerakusan atau keserakahan menyebabkan seseorang mengabaikan halal dan haram ketika mengejar makanan, sehingga memiliki terlalu banyak atribut tersebut dapat menyebabkan korupsi. Selain itu, orang yang memiliki moral yang rendah akan sulit untuk menahan dorongan untuk melakukan korupsi, terutama jika godaan tersebut datang dari teman, atasan, atau orang lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Selain itu, gaya hidup konsumtif juga dapat menjadi komponen internal yang berkontribusi terhadap korupsi, karena permainan uang dan korupsi dapat didorong oleh perilaku masyarakat yang materialistis dan konsumtif serta sistem politik yang terus mendewakan harta benda. Oleh karena itu, elemen internal yang berkontribusi terhadap korupsi SYL termasuk konsumerisme, moralitas yang rendah, dan ketamakan.

Politik, hukum, ekonomi, dan sosial adalah contoh dari kekuatan eksternal. Berikut ini penjelasan lebih mendalam terkait 4 kekuatan eksternal tersebut:

1. Politik: Dalam kasus SYL, kebijakan-kebijakan pribadi dibuat untuk anggota stafnya yang menduduki posisi eselon 1 dan eselon 2 sebagai pejabat senior, sehingga menjadi cara untuk melakukan korupsi. Hal ini menyiratkan bahwa korupsi dapat dipengaruhi oleh masalah politik.
2. Hukum: Cara korupsi dilakukan dapat dipengaruhi oleh para petinggi dalam sistem hukum yang mengendalikan pencurian dan penggunaan keuangan. Dalam kasus SYL, pembayaran cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard milik SYL dilakukan dengan menggunakan mata uang asing yang diterima setiap bulan melalui KS dan MH.
3. Ekonomi: Praktik korupsi dapat dipengaruhi oleh alasan ekonomi seperti gaji pegawai yang rendah dan pendapatan yang tidak stabil. Dalam kasus SYL, korupsi didorong oleh otoritas pemerintah serta kesempatan pejabat pemerintah dan sekutunya untuk menikmati uang.
4. Sosial: Korupsi didorong oleh nilai-nilai sosial seperti keyakinan bahwa individu adalah korban utama korupsi, bahwa individu tidak menyadari keterlibatan mereka dalam korupsi, dan bahwa individu dapat secara aktif berkontribusi pada agenda pemantauan dan pencegahan korupsi.

Dalam kasus SYL, faktor eksternal seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial juga mempengaruhi terjadinya tindakan korupsi oleh SYL. Faktor-faktor inilah yang sangat mempengaruhi terjadinya korupsi oleh SYL.

### 3.3 Dampak Kasus Korupsi Terhadap Sektor Lain

Mantan Menteri Pertanian Indonesia, Syahrul Yasin Limpo (SYL), menjadi subyek kasus korupsi yang berdampak besar pada masyarakat luas dan juga industri pertanian. Gugatan tersebut telah menyebabkan Kementerian Pertanian (Kementan) memutuskan semua kontrak untuk mesin dan peralatan yang digunakan di bidang pertanian, yang dikenal sebagai Alsintan. Para petani kini terpaksa bekerja secara manual, yang berdampak pada efisiensi waktu tanam mereka, yang berpotensi meningkat dengan bantuan peralatan pemerintah. Selain itu, kurangnya perluasan lahan menghambat sejumlah kegiatan, termasuk penanaman bawang putih dan program pencetakan sawah. Karena itu, peningkatan produksi pangan tidak selalu dikaitkan dengan investasi di sektor

pertanian. Tidak hanya Industri Pertanian saja yang dirugikan, tetapi capres Anies-Muhaimin pastinya kena dampaknya lantaran para pemilih akan ragu karena capres tersebut didukung oleh partai yang menterinya korup, ini berdampak pada elektabilitas parta NasDem dan pasangan capres Anies-Muhaimin

Masyarakat umum juga terkena dampak dari kasus ini. Karena masyarakat adalah pemilik sah dari uang negara, maka kasus korupsi ini merugikan negara dan masyarakat secara tidak langsung. Insiden ini juga mempengaruhi elektabilitas partai dan juga calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bagaimana kasus korupsi tidak hanya berdampak pada industri yang terkena dampak langsung, namun juga pada iklim politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan. Jadi, industri pertanian, partai, capres dan juga masyarakat luas sangat menderita akibat kasus korupsi SYL. Hal ini menyoroti betapa pentingnya menghentikan dan memerangi korupsi untuk menjaga kejujuran dan akuntabilitas di sektor publik dan pemerintahan.

### **3.4 Implikasi Kasus Korupsi SYL Terhadap Penurunan Integritas, Netralitas, dan Public Trust**

Integritas dan pencegahan korupsi merupakan bidang yang sangat sensitif dan cenderung mendapat banyak perhatian dari media serta berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat. Data dari komisi pemberantasan korupsi sendiri terkait indeks integritas nasional yang didapat dari Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan bahwa integritas nasional tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Pada tahun 2020, indeks integritas nasional tahun 2020 mendapat skor 82,6 poin, di tahun 2021 sebesar 72,43 poin, dan di tahun 2022 menjadi 71,94 poin. Survei Penilaian Integritas tersebut mempertimbangkan tujuh faktor dalam pelaksanaannya, yaitu pengadaan barang dan jasa, integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan anggaran; transparansi; perdagangan pengaruh; pengelolaan sumber daya manusia; serta sosialisasi antikorupsi.

Kasus korupsi yang dilakukan eks menteri pertanian SYL menjadi sorotan media dan publik. Tidak hanya korupsi, tetapi juga terdapat indikasi pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip integritas yang seharusnya ada di setiap elemen pemerintahan, termasuk kementerian. Sebagai figur nomor satu di kementerian pertanian, kasus korupsi SYL mencerminkan adanya penurunan terhadap kualitas integritas birokrat. Artinya, ia telah gagal dalam menepati janji dan berkomitmen untuk jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun penyelewengan yang dilakukan SYL telah melanggar hukum dan undang - undang, di antaranya Pasal 12E dan 12B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta Pasal 3 dan/atau 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus yang menjerat SYL merupakan bentuk adanya pelanggaran aspek netralitas. Netralitas dalam pemerintahan sendiri merupakan suatu prinsip yang mengharuskan seluruh lapisan pemerintahan untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara objektif, independen, dan tidak memihak kepada partai politik atau kepentingan tertentu. Dugaan aliran dana dari Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Partai Nasdem seperti yang disampaikan oleh Wakil

Ketua KPK Alexander Marwata merupakan indikasi keberpihakan terhadap partai politik ataupun kepentingan tertentu. SYL juga telah bersikap tidak profesional dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat sebab ia memilih merampas uang untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara.

Penurunan integritas dan netralitas akibat kasus yang menjerat SYL berdampak kepada penurunan public trust atau kepercayaan publik. Kasus korupsi miliaran rupiah yang dilakukan SYL tentu memberi dampak yang signifikan terhadap public trust akibat tercerminnya integritas dan netralitas yang hilang dari sosok seorang menteri. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak percaya bukan hanya kepada individu yaitu SYL tetapi juga tidak percaya pada partai politiknya. Ketidakpercayaan ini kemudian dapat mempengaruhi elektabilitas dari anggota - anggota di partai tersebut.

Public trust yang menurun dapat disebabkan oleh terkikisnya moral lembaga - lembaga negara ataupun pejabat publik. Inilah yang persis dilakukan oleh mantan menteri pertanian. Ketika public trust menurun, masyarakat akan skeptis terhadap kegiatan - kegiatan yang dilakukan pemerintah. Menurut Erber dan Lau (1990), legitimasi suatu pemerintah bisa berada dalam bahaya jika sebagian besar rakyat tidak mempercayai pemerintahnya untuk jangka waktu yang lama, dimana hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hukum dan dukungan terhadap pihak radikal atau anti demokrasi. Selain itu, menurut Hetherington, M (1998) dalam bukunya *The Political Relevance of Trust*, kepercayaan publik akan meningkatkan legitimasi dan keefektifan dari pemerintah yang demokratis dan kepercayaan ini juga menjadi penghubung antara rakyat dan institusi yang mewakilinya.

### 3.5 Upaya Pemulihan Public Trust

Public trust merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dan dijaga jika suatu negara menginginkan harmoni antara pemerintah dan warganya. Public trust juga dapat memastikan urusan - urusan publik berjalan dengan baik. Ketika terjadi pengikisan kepercayaan masyarakat akibat ulah sektor pemerintah, pemerintah juga yang harus berusaha memulihkan kepercayaan tersebut sebelum masyarakat menjadi acuh dan skeptis terhadap pemerintahan.

Pemulihan public trust dalam kasus korupsi Menteri Pertanian SYL dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang relevan. Salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor. Hasan & Hantoro (2023) menekankan pentingnya penegakan hukum dan transparansi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Tindakan hukum yang tegas dan transparan akan memberikan sinyal kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Selain itu, perlu adanya upaya pencegahan korupsi melalui perubahan undang-undang yang mengikat dan membuat para aparatur publik takut untuk melaksanakan korupsi. Undang-undang yang jelas dan tegas dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas tindakan korupsi.

Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan pengawasan internal dan eksternal pemerintahan serta mengoptimalkan sistem pencegahan berbasis IT. Adanya pengawasan baik internal maupun eksternal yang kuat dalam mendeteksi korupsi dan sistem pencegahan yang efektif diharapkan dapat meminimalisir tindakan korupsi sehingga public trust dapat pulih. Dalam konteks kasus korupsi Menteri Pertanian SYL, upaya pemulihan public trust juga perlu melibatkan pendekatan sosial dan edukasi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat membantu membangun kembali public trust yang terkikis akibat kasus korupsi tersebut.

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Tindak korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah berdampak secara signifikan kepada sektor kenegaraan. Industri pertanian menjadi salah satu sektor yang terdampak, dimana semua semua kontrak untuk mesin dan peralatan yang digunakan di bidang pertanian telah putus sehingga petani terpaksa bekerja manual dan mengikis efisiensi waktu. Selain itu, iklim politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan juga ikut terdampak. Akan tetapi, korupsi yang dilakukan SYL tidak luput dari faktor - faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Faktor internal seperti konsumerisme, moralitas yang rendah, dan ketamakan serta faktor eksternal seperti hukum, ekonomi, dan sosial menjadi dorongan dilakukannya tindak korupsi.

Korupsi turut mempengaruhi penurunan integritas, netralitas, dan public trust. Ketidakmampuan untuk menjaga prinsip kepatuhan pada aturan, teguh akan nilai-nilai, dan komitmen kejujuran terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri menjadi bentuk tercorengnya integritas SYL maupun mereka yang ikut andil terhadap kasus ini. Keberpihakan SYL kepada partainya, dengan menyalurkan uang yang bukan milik pribadi merupakan aspek netralitas yang gagal dipenuhi. Lebih lanjut, adanya kasus korupsi yang melibatkan uang miliaran rupiah ini menurunkan public trust terhadap institusi pemerintah. Masyarakat menjadi skeptis terhadap pemerintah dan hal ini berpengaruh pada keberlangsungan negara Indonesia. Memulihkan public trust yang menurun bukanlah hal yang tidak mungkin walaupun terbilang sulit. Upaya - upaya seperti penegakan hukum yang tegas, pencegahan korupsi melalui perubahan undang-undang, serta peningkatan pengawasan dalam pemerintahan menjadi cara yang dapat dilakukan untuk memulihkan public trust.

### **4.2 Saran**

Korupsi merupakan tantangan yang berat dalam menciptakan good governance dan sulit untuk dihilangkan secara permanen dan menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya aturan atau undang - undang yang mengikat dan membuat para aparatur publik takut untuk melaksanakan korupsi. Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya korupsi antara lain:

1. Merubah undang - undang yang masih tumpang tindih dengan kepentingan individu atau kelompok. Suatu undang - undang sebaiknya berlaku sama untuk seluruh individu tanpa ada campur tangan kepentingan segelintir orang yang dapat diuntungkan.
2. Mengoptimalkan serta memaksimalkan pengawasan internal dan eksternal pemerintahan dengan turut meningkatkan kemampuan sistem serta sumber daya internal dalam mendeteksi korupsi.
3. Mengembangkan dan menguatkan efektivitas sistem pencegahan berbasis IT.
4. Membuat undang - undang yang tegas yang dapat membuat aparat publik segan untuk melakukan korupsi.
5. Mengembangkan sistem pengaduan yang melindungi pelapor korupsi

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budiyanto, A. (2023, November 20). *Penerapan Netralitas ASN di Lingkungan Kementerian Keuangan: Sebuah Upaya Konkrit Menjaga Integritas dan Profesionalisme*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved December 10, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/16602/Penerapan-Netralitas-ASN-di-Lingkungan-Kementerian-Kuangan-Sebuah-Upaya-Konkrit-Menjaga-Integritas-dan-Profesionalisme.html>
- CNBC Indonesia (2023, October 9). *Kronologi Kasus SYL, Dugaan Pemerasan Hingga Pamit Ke Jokowi*. Retrieved from [Cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20231009103703-4-478981/kronologi-kasus-syl-dugaan-pemerasan-hingga-pamit-ke-jokowi](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231009103703-4-478981/kronologi-kasus-syl-dugaan-pemerasan-hingga-pamit-ke-jokowi)
- Cooper, J. (Ed.). (1999). *Congress and the Decline of Public Trust*. Avalon Publishing.
- Daulay, A. (2022, March 25). *ASN: Integritas dan Tantangannya*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Retrieved December 10, 2023, from <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/asn-integritas-dan-tantangannya>
- Fajardini, N. (2023). ANALISIS PERAN KOMUNIKASI INTERNAL ORGANISASI PPID DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3699-3708.
- Hasan, A. A., & Hantoro, J. (2023, Oktober 5). *Surya Paloh Sebut Kasus Syahrul Yasin Limpo Pengaruhi Elektabilitas Partai dan Anies-Cak Imin*. Retrieved from [tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1780278/surya-paloh-sebut-kasus-syahrul-yasin-limpo-pengaruh-elektabilitas-partai-dan-anies-cak-imin](https://nasional.tempo.co/read/1780278/surya-paloh-sebut-kasus-syahrul-yasin-limpo-pengaruh-elektabilitas-partai-dan-anies-cak-imin)
- M, A. K. (2023, June 15). *Begini Dugaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Kronologi, Modus, dan Dampaknya bagi Keuangan Negara*. Retrieved from [intisari.grid.id: https://intisari.grid.id/read/033813381/begini-dugaan-kasus-korupsi-syahrul-yasin-limpo-kronologi-modus-dan-dampaknya-bagi-keuangan-negara](https://intisari.grid.id/read/033813381/begini-dugaan-kasus-korupsi-syahrul-yasin-limpo-kronologi-modus-dan-dampaknya-bagi-keuangan-negara)
- Mardiyanta, Antun (2013) "Restore Public Trust Through Deliberative Public Policy Formulation," *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*: Vol. 20 : No. 1 , Article 2.
- Mustajab, R. (2022, December 16). *KPK: Indeks Integritas Nasional Sebesar 71,94 pada 2022*. Data Indonesia. Retrieved December 10, 2023, from <https://dataindonesia.id/varia/detail/kpk-indeks-integritas-nasional-sebesar-7194-pada-2022>
- Nainggolan, B. (2023, October 12). *Syahrul Yasin Limpo Tersangka, Besarkah Problem Integritas di Kementan?* *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/07/syahrul-yasin-limpo-tersangka-besarkah-problem-integritas-di-kementan>
- Organisation For Economic Co-Operation And Development. (2005). *Public Sector Integrity A Framework For Assessment*. Oecd Publishing.
- Powell, M. (Ed.). (2020). *Corruption in a Global Context: Restoring Public Trust, Integrity, and Accountability*. Taylor & Francis Group.
- Pratama, G. (2023, September 29). *Segini Kekayaan Syahrul Yasin Limpo yang Diduga Terjerat Kasus Korupsi di Kementan*. Retrieved from [infobanknews.com: https://infobanknews.com/segini-kekayaan-syahrul-yasin-limpo-yang-diduga-terjerat-kasus-korupsi-di-kementan/](https://infobanknews.com/segini-kekayaan-syahrul-yasin-limpo-yang-diduga-terjerat-kasus-korupsi-di-kementan/)

Putra, D. A. (2023, October 7). *Jejak Kebijakan SYL di Kementan hingga Mundur karena Isu Korupsi*. Retrieved from tirta.id: <https://tirta.id/jejak-kebijakan-syl-di-kementan-hingga-mundur-karena-isu-korupsi-gQMs>